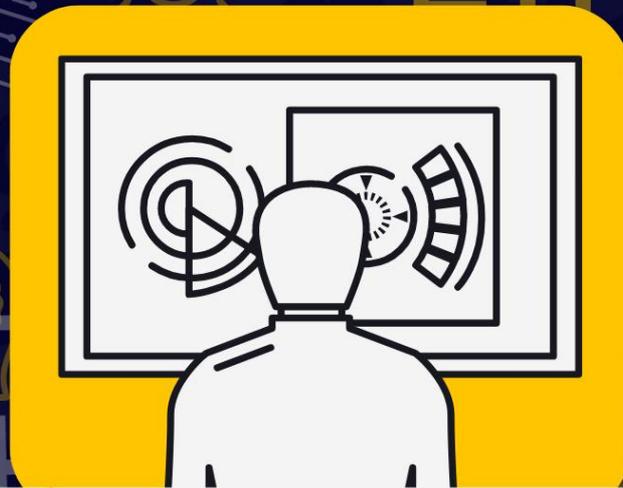




# JGOP

## JOURNAL OF GOVERNMENT AND POLITICS



**Volume 5 Nomor 1 JULI 2023**

**ISSN 2774-728X (Print) ISSN: 2686-3391 (Online)**

[Jgop.fisip@ummat.ac.id](mailto:jgop.fisip@ummat.ac.id)

SCAN ME



# JGOP

<http://journal.ummat.ac.id/index.php/jsip>

Exploring Paradiplomacy Pathways: Local Government and Foreign Direct Investment Corporation Partnerships for Sustainable Development

Ahmad Harakan, Ahmad Taufik

01-18

Collective Action and Climate Change Adaptation in Makassar

Anirwan, Qamal

19-31

Evaluasi Kebijakan Perdagangan Lobster yang Pro Nelayan di Provinsi Aceh

Vellayati Hajad, fadhil Ilhamsyah, Nurasma Aripin

32-49

Tujuan UCLG ASPAC dalam Implementasi Kerjasama Lingkungan Climate Resilience and Inclusive Cities (CRIC) Project di Kota Cirebon

Fariz Reza Ferdiansyah, Aditya Maulana Hasymi

50-68

Kerjasama NGO Pada Program Pemerintah Dalam Mengurangi Angka Pernikahan Usia Anak Di Kabupaten Mamuju

Andi Nur Fiqhi Utami, Asma Amin

69-93

Perumusan Strategi Pengembangan Desa Wisata Kebon Ayu Berbasis Analisis Swot

Vidya Yanti Utami, Siti Yulianah M. Yusuf, Johan Mahsuri

94-115



Journal of Government and Politics (JGOP) ISSN:2686-3391  
Vol. 5 No. 1 Juli 2023

## Journal of Government and Politics (JGOP)

<http://journal.ummat.ac.id/index.php/jsip>



### Tujuan UCLG ASPAC dalam Implementasi Kerjasama Lingkungan Climate Resilience and Inclusive Cities (CRIC) Project di Kota Cirebon

Fariz Reza Ferdiansyah<sup>1</sup>, Aditya Maulana Hasymi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Hubungan Internasional, Universitas Amikom Yogyakarta, Indonesia

#### Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima: 02-11-2022

Disetujui: 13-07-2023

Dipublikasikan :

**17-07-2023**

Kata Kunci :

***UCLG ASPAC Goals,  
CRIC, Cirebon City***

Pada tahun 2020 lalu, Kota Cirebon dipilih oleh UCLG ASPAC sebagai salah satu kota percontohan dalam sebuah proyek kerjasama lingkungan bernama Climate Resilience and Inclusive Cities (CRIC). Meskipun begitu, Pemerintah Kota Cirebon pada dasarnya sudah memiliki berbagai upaya dalam menangani permasalahan ketahanan iklim yakni dengan pengembangan program Kampung Iklim (Proklam) hingga pengembangan program Pelayanan Sampah dan Kebersihan. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berbasis internet, dokumen dan wawancara. Penelitian ini menggunakan teori peran organisasi internasional untuk menjelaskan tujuan UCLG ASPAC dalam implementasi kerjasama lingkungan Climate Resilience and Inclusive Cities (CRIC) Project di Kota Cirebon. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemilihan Kota Cirebon sebagai kota percontohan dalam proyek CRIC oleh UCLG ASPAC didorong oleh adanya isu perubahan iklim yang mana dalam hal ini UCLG ASPAC menginginkan agar kota tersebut bertindak sesuai dengan arahan UCLG ASPAC khususnya dalam upaya menangani perubahan iklim di Kawasan Asia Pasifik.

---

***UCLG ASPAC goals in the implementation of Environmental Cooperation through Climate Resilience and Inclusive Cities (CRIC) Project in the city of Cirebon***

---

**Abstract**

*In 2020, Cirebon city was chosen by UCLG ASPAC as one of the pilot cities in an environmental cooperation project called Climate Resilience and Inclusive Cities (CRIC). Even so, the Cirebon city government basically already has various efforts in dealing with climate resilience issues, namely the development of the climate Village program (Proklim) to the development of waste and hygiene service programs. The methodology used in this study is a qualitative method with internet-based data collection techniques, documents and interviews. This study uses the theory of the role of international organizations to explain the goals of UCLG ASPAC in the implementation of environmental cooperation Climate Resilience and Inclusive Cities (CRIC) Project in the city of Cirebon. This study shows that the selection of Cirebon city as a pilot city in the CRIC project by UCLG ASPAC is driven by the issue of climate change which in this case UCLG ASPAC wants the city to act in accordance with the direction of the organization, especially in an effort to deal with climate change in the Asia Pacific region.*

---

\*Alamat Korespondensi:

[farizreza200@gmail.com](mailto:farizreza200@gmail.com)

## **PENDAHULUAN**

Globalisasi telah memberikan perubahan besar pada kajian studi hubungan internasional, membuatnya menjadi semakin meluas di dalam ruang lingkup global. Globalisasi sendiri dipahami sebagai suatu fenomena meluas dan meningkatnya hubungan hubungan ekonomi, sosial, dan budaya yang melewati lintas batas negara (Sørensen & Jackson, 2013). Politik dunia yang saat ini sudah tidak lagi didominasi oleh aktor state merupakan salah satu indikasi dari fenomena globalisasi yang semakin marak. Globalisasi membuat sistem politik menjadi terdesentralisasi dan memunculkan tren aktor-aktor baru dalam hubungan internasional.

Beberapa tahun belakangan ini aktor-aktor sub-nasional seperti pemerintah kota dan daerah mulai terlibat di dalam skenario-skenario tata kelola global. Selain diakibatkan oleh pengaruh globalisasi, keterlibatan aktor sub nasional tersebut juga diakibatkan oleh adanya tumpang tindih antara kebijakan domestik dan kebijakan luar negeri juga antara low politics dan high politics (D. Wu, 2020). Dalam mengatasi isu-isu urban yang semakin beragam, berbagai pemerintah kota dan daerah di seluruh dunia mulai membangun jaringan mereka melintasi batas-batas negara. Fenomena ini kemudian dinamakan sebagai jaringan kota transnasional atau Transnational Municipal Networks (TMN).

TMN merupakan sebuah paradigma baru dalam studi organisasi internasional. Paradigma ini melibatkan studi tentang tata kelola pemerintahan terkait proses pengambilan keputusan dan otoritas yang melibatkan pemerintah internasional, nasional maupun sub-nasional (Wiharani & Holzacker, 2016). Beberapa peneliti seringkali mengaitkan TMN dengan isu-isu lingkungan global di Eropa. Betsill dan Bulkeley (2004) dalam penelitiannya berjudul “Transnational Networks and Global Environmental Governance: The cities for climate protection program” menyebutkan bahwa TMN menjadi salah satu aktor yang signifikan dalam mengatasi permasalahan iklim di Eropa khususnya melalui program yang bertajuk Cities for Climate Protection (CCP). Dengan demikian, isu lingkungan menjadi salah satu isu yang seringkali diangkat dalam fenomena jaringan kota transnasional yang mana dalam hal ini pemerintah sub-nasional berada dalam posisi penting untuk beradaptasi dan memitigasi dampak dari masalah lingkungan.

Fenomena jaringan kota transnasional bisa dilihat pada organisasi United Cities and Local Governments (UCLG). Sebagai sebuah jaringan kota global tertua di dunia yang saat ini masih berdiri, di tahun 2000 sebanyak 1000 kota dan 112 asosiasi pemerintah kota di 95 negara telah bergabung kedalam keanggotaan UCLG (Cities Alliance, n.d.). UCLG didirikan melalui gabungan dari International Union of Local Authorities (IULA), United Town Organization (UTO) dan World Association of the Major Metropolises (METROPOLIS) dan memiliki peran dalam melibatkan aktor-aktor sub-nasional untuk memastikan tercapainya agenda-agenda global di level lokal maupun regional (UCLG, n.d.). Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa UCLG memiliki tujuan tertentu dalam mencapai agenda-agenda global seperti pembangunan dan lingkungan yang mana kedua hal itu menjadi konsentrasi bagi cabang UCLG sendiri yang terletak di kawasan Asia Pasifik bernama Cities and Local Governments Asia Pacific (UCLG ASPAC).

UCLG ASPAC memiliki komitmen untuk membantu pengembangan juga implementasi aksi iklim dalam pencapaian SDGs (UCLG ASPAC, 2021). Di Indonesia sendiri khususnya, komitmen ini dituangkan melalui proyek kerjasama lingkungan yang bernama Climate Resilience and Inclusive Cities (CRIC). Kerjasama ini melibatkan berbagai stakeholder salah satunya Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) dan memiliki tujuan untuk mendorong pembangunan berkelanjutan di kawasan urban, menciptakan good governance juga adaptasi/mitigasi

iklim melalui kerjasama triangular pada kawasan-kawasan Asia Tenggara, Asia Selatan dan Eropa (Gaborit et al., 2020). Dalam proyek tersebut, Kota Cirebon dipilih oleh UCLG ASPAC sebagai salah satu kota percontohan (pilot project) dalam penanganan permasalahan ketahanan iklim pada tahun 2020 lalu melalui pertemuan *Launching and Kick off Climate Resilience Inclusive Cities Project*.

Kota Cirebon merupakan salah satu kota yang tergabung dalam keanggotaan APEKSI yang mana asosiasi tersebut sendiri memiliki program kerjasama antar pemerintah daerah dalam pembangunan berkelanjutan. Sebagai sebuah kota yang terletak di kawasan pesisir utara Pulau Jawa, Kota Cirebon memiliki kerentanan yang tinggi terhadap bencana iklim yang diakibatkan oleh kenaikan permukaan air laut. Di tahun 2020 yang lalu kenaikan permukaan air laut rata-rata dunia telah mencapai 91,3 milimeter yang mana merupakan di atas rata-rata tahun 1993 (Lindsey, 2021).

Isu ketahanan iklim sudah menjadi salah satu fokus perhatian pemerintah Kota Cirebon sejak beberapa tahun belakangan ini. Isu ketahanan iklim di Kota Cirebon erat kaitannya dengan permasalahan pengelolaan sampah di kota tersebut yang masih belum teratasi. Wakil Walikota Cirebon Eti Herawati menjelaskan bahwa Kota Cirebon menghasilkan sampah hingga 350 ton setiap harinya (Handayani & Puspita, 2021). Meskipun begitu, jumlah tersebut tidak dibarengi dengan ketersediaan fasilitas pengelolaan sampah. Berdasarkan data Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sampah Kopi Luhur, jumlah sampah yang terus meningkat diperkirakan akan membuat Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) Kopi Luhur mengalami kepenuhan dalam tiga tahun lagi. TPA Kopi Luhur selama ini menampung seluruh sampah di Kota Cirebon, namun tanpa adanya fasilitas pengelolaan sampah di tingkat masyarakat seperti RW, TPA tersebut tidak akan dapat digunakan lagi (Fikri, 2021).

Permasalahan pengelolaan sampah menjadi suatu hambatan tersendiri dalam membangun ketahanan iklim di Kota Cirebon. Hal ini juga dapat menghambat tercapainya agenda SDGs dimana diantara 17 tujuan SDGs, pembentukan kota tahan iklim di Kota Cirebon memiliki keterkaitan erat pada tujuan ke-11 mengenai kota dan pemukiman yang berkelanjutan dan tujuan ke-13 mengenai penanganan perubahan iklim. Pemerintah Kota Cirebon pada dasarnya sudah memiliki berbagai upaya dalam menangani permasalahan ketahanan iklim antara lain dengan pengembangan program Kampung Iklim (Proklim), penanaman mangrove di kawasan pesisir pantai, hingga

pengembangan program Pelayanan Sampah dan Kebersihan. Hal ini selaras dengan Misi ke-tiga Kota Cirebon yaitu: “Meningkatkan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana umum berwawasan lingkungan” (Pemerintah Daerah Kota Cirebon, 2021). Melalui berbagai upaya yang telah dilakukan tersebut, Kota Cirebon berhasil meraih berbagai penghargaan seperti Kota Terbaik Penyelenggara Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) se-Jawa Barat, Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (DIKPLH), Penghargaan Program Kampung Iklim (Proklam) Utama (Radar Cirebon, 2021). Dilihat dari upayanya, Pemerintah Kota Cirebon sendiri sudah sangat berperan dalam penanganan masalah lingkungan namun UCLG ASPAC tetap memilih Kota Cirebon sebagai salah satu kota percontohan dalam implementasi CRIC.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tujuan UCLG ASPAC dalam memilih Kota Cirebon sebagai salah satu kota percontohan pada implementasi kerjasama lingkungan terkait ketahanan iklim Climate Resilience and Inclusive Cities (CRIC) Project dengan menggunakan teori peran organisasi internasional. Clive Archer (1983) dalam bukunya *International Organizations* menyebutkan bahwa organisasi internasional merupakan struktur formal (birokrasi) yang dibentuk secara terus menerus melalui perjanjian antara anggota (pemerintah maupun non pemerintah) dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan untuk mengejar kepentingan bersama dari keanggotaan. Organisasi internasional (IO) memiliki sistem formal dimana berisi aturan dan tujuan, administrasi. Konstitusi, sumber daya, simbol-simbol, sekretariat dan sebagainya.

Dalam sistem internasional, IO memiliki peranan tertentu yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip dan sifat dasar organisasi internasional (S. Kelly & Pease, 2008). Menurut Archer peranan organisasi internasional dibagi kedalam tiga kategori yaitu instrumen, arena dan aktor. Peran organisasi internasional sebagai instrumen berarti organisasi internasional menjadi alat bagi anggotanya dalam mencapai kepentingan nasionalnya masing-masing. Peranan kedua adalah arena. Dalam hal ini organisasi internasional menjadi arena bagi anggotanya dalam mencari solusi terhadap permasalahan-permasalahan domestik baik di negara mereka ataupun domestik di negara lain. Peranan terakhir adalah sebagai aktor dimana dalam hal ini IO adalah aktor independen yang bebas mengambil keputusan tanpa dipengaruhi oleh pihak manapun. Berdasarkan penjelasan diatas, maka rumusan masalah yang diambil

dalam penelitian ini adalah “Mengapa UCLG ASPAC memilih Kota Cirebon sebagai salah satu kota percontohan dalam implementasi Climate Resilience and Inclusive Cities (CRIC) Project?”

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka. Metode studi pustaka digunakan selain karena secara bibliografi bermanfaat dalam meyatukan informasi empiris dalam membentuk pokok bahasan artikel, namun juga bermanfaat sebagai alternatif bagi penulis untuk mengatasi keterbatasan dalam penelitian langsung di lapangan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian adalah dengan menggunakan metode studi kepustakaan dan wawancara. Melalui metode studi kepustakaan, penulis mengumpulkan data sekunder yang bersumber dari media massa, artikel online maupun dokumen resmi institusi tertentu terkait UCLG ASPAC. Selain itu, wawancara juga digunakan sebagai data pendukung penelitian untuk lebih memahami ancaman perubahan iklim di Kota Cirebon. Data yang ada diolah oleh penulis dengan metode critical reading.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Ancaman Perubahan Iklim di Kota Cirebon**

Isu perubahan iklim saat ini telah menjadi isu yang sifatnya transnasional. United Nations Environmental Programme menyebutkan bahwa perubahan iklim berdampak pada kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan dalam banyak konteks, yang mana dapat menciptakan kondisi ketidakamanan di tingkat lokal atau bahkan internasional (UNEP, n.d.). Perubahan iklim juga mengakibatkan pada kenaikan permukaan air laut yang mana dapat menyebabkan tenggelamnya kota-kota yang terletak di kawasan pesisir. Laporan United Nations Framework Convention on Climate Change menyatakan bahwa antara tahun 2013 hingga 2021, permukaan air laut telah meningkat sebanyak 4,4 milimeter per tahun (UNFCCC, 2021). Meskipun begitu, Wu (2022) dalam penelitiannya yang berjudul *Subsidence in Coastal Cities throughout World Observed by InSAR* menyebutkan bahwa kota-kota pesisir yang terletak di kawasan Asia mengalami kenaikan permukaan laut hampir tujuh kali lipat lebih cepat. Hal ini dikarenakan adanya aktivitas manusia khususnya ekstraksi air tanah yang dilakukan secara berlebihan sehingga mengakibatkan permukaan tanah semakin menurun.

Sending dkk. (2020) dalam penelitiannya berjudul *Climate Change and International Relations: A Five-Pronged Research Agenda* menyebutkan bahwa bagian dataran rendah di Indonesia akan terdampak langsung dari kenaikan permukaan air laut. Hal serupa terjadi di Kota Cirebon yang mana kota ini tengah dihadapi pada ancaman perubahan iklim. Isu perubahan iklim sendiri bukanlah merupakan isu yang baru di Kota Cirebon. Isu ini sudah menjadi fokus bagi APEKSI sejak beberapa tahun belakangan ini. Hal tersebut sebagaimana yang dinyatakan oleh Wakil Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi APEKSI bahwa APEKSI telah menaruh perhatian pada isu perubahan iklim sejak tahun 2009 dan berupaya untuk bersama-sama menghadapi perubahan iklim melalui pembentukan jaringan nasional dan kerjasama lainnya (Riawan, 2022).

Secara geografis, Kota Cirebon terletak di pesisir utara bagian timur Jawa Barat. Sebagai sebuah dataran rendah, kota ini memiliki ketinggian yang bervariasi antara 0-150 meter di atas permukaan laut dengan garis pantai sekitar  $\pm 7$  km<sup>2</sup>, yang mana menjadikan kota ini juga rentan mengalami genangan dan banjir (Priyadi et al., 2020). Di tengah naiknya permukaan air laut, kondisi muka tanah di kota tersebut juga mengalami penurunan secara ekstrem. Peneliti Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Eddy Hermawan (dalam Laksono, 2021) menyatakan bahwa Kota Cirebon termasuk kedalam kota yang paling rawan terhadap penurunan tanah ekstrem yang mana berkisar antara 0,1 cm hingga 4,3 cm per tahun. Lebih lanjut Eddy juga menambahkan bahwa penurunan tanah tersebut disebabkan oleh aktivitas pembangunan infrastruktur jalan dan perekonomian yang terlalu dipusatkan pada wilayah Pantai Utara. Potensi bencana alam yang dihadapi oleh Kota Cirebon juga dikonfirmasi oleh Kepala Sub Bidang Perencanaan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Lingkungan Hidup, Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan sekaligus salah satu anggota working group (POKJA) CRIC, Mira Anugrah. Melalui wawancara, Mira menyatakan bahwa, “Kota Cirebon berpotensi tinggi terhadap bencana alam seperti gelombang pasang ekstrim, banjir/rob, dan kekeringan yang mana intensitas kejadian tersebut mengindikasikan fenomena perubahan iklim”.

Selain itu, isu perubahan iklim di Kota Cirebon juga memiliki permasalahan yang vital, yakni permasalahan pada sektor pengelolaan sampah. Berdasarkan hasil wawancara, Mira menyatakan bahwa arus urbanisasi mengakibatkan pada naiknya volume sampah yang harus dikelola kota setiap harinya. Di sisi lain, sektor

pengelolaan sampah di Kota Cirebon saat ini masih memiliki kendala dalam sarana dan prasarana yang mendukungnya. Lebih lanjut Mira menyatakan bahwa emisi karbon yang berasal dari sektor pengelolaan sampah berkontribusi cukup besar terhadap perubahan iklim.

**Tabel 1 Volume Sampah di Kota Cirebon Tahun 2021**

Kecamatan	Kuantitas	Unit
Kejaksan	41,005	m3/hari
Lemahwungkuk	48,921	m3/hari
Harjamukti	101,837	m3/hari
Pekalipan	25,939	m3/hari
Kesambi	64,589	m3/hari
Total Sampah Kota	282,291	m3/hari
Volume Sampah yang diangkut ke TPA	562	m3/hari
Jumlah Bank Sampah	25	unit

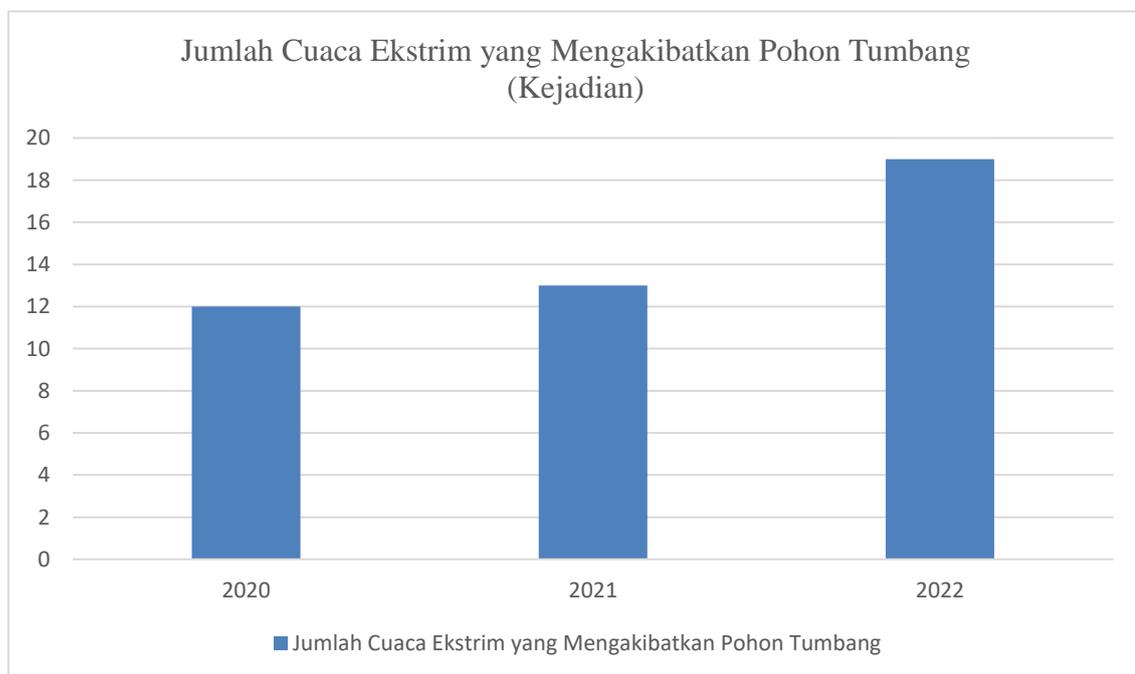
**Sumber: (Cirebon Satu Data, 2022)**

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa terdapat ketimpangan antara jumlah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dengan tingginya volume sampah di Kota Cirebon. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung dalam pengelolaan sampah kota dapat menjadi penyumbang emisi gas rumah kaca (GRK) sekaligus menghambat tercapainya target NDC Indonesia. United Nations Habitat menyebutkan bahwa kota menjadi penyumbang terbesar terhadap perubahan iklim di dunia dengan emisi GRK yang dikeluarkan sebanyak lebih dari 60%. Sebagian dari emisi tersebut berasal dari sektor pengelolaan sampah yang mana bertanggung jawab terhadap 5 hingga 10% dari keseluruhan GRK global pada perkiraan tahun 2025 di bawah skenario business-as-usual (UN Habitat, n.d.).

Ancaman perubahan iklim dihadapi oleh Kota Cirebon mendorong terpilihnya Kota Cirebon sebagai salah satu kota percontohan dalam CRIC. Dari perspektif UCLG ASPAC, kerjasama lingkungan yang melibatkan berbagai pemangku

kepentingan membuat kota lebih memiliki resiliensi dalam menghadapi perubahan iklim. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Bernadia (dalam UCLG ASPAC, 2020) pada Local Governments Newsletter bahwa melalui CRIC, kepemimpinan politik daerah, jaringan maupun para ahli memiliki peran yang krusial dalam menciptakan kota yang berketahanan dan inklusif. Lebih lanjut, dalam artikel tersebut juga disebutkan bahwa UCLG ASPAC menempatkan fokusnya pada daerah atau kota yang memiliki kerentanan terhadap dampak perubahan iklim. Upaya tersebut dilakukan dalam rangka memastikan efek inklusif-nya juga membantu mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi.

**Tabel 2 Jumlah Cuaca Ekstrim 2020-2022**



**Sumber: (Cirebon Satu Data, 2022)**

Berdasarkan data tersebut, jumlah cuaca ekstrim di Kota Cirebon meningkat tiap tahunnya. Dari yang semula di tahun 2020 sebanyak 12 kejadian menjadi 19 kejadian di tahun 2022. Hal tersebut menunjukkan Kota Cirebon yang semakin rentan terhadap perubahan iklim. Selain karena faktor kerentanan terhadap dampak perubahan iklim yang dialami oleh Kota Cirebon, Gaborit (2022) dalam penelitiannya berjudul *Climate Adaptation to Multi-Hazard Climate Related Risks in Ten Indonesian Cities: Ambition and Challenges* menyebutkan bahwa pemilihan kota-kota percontohan dalam proyek CRIC didasari pada ukuran dari sebuah kota. Dalam hal ini, UCLG ASPAC memilih kota-kota pesisir dengan ukuran kecil dan menengah

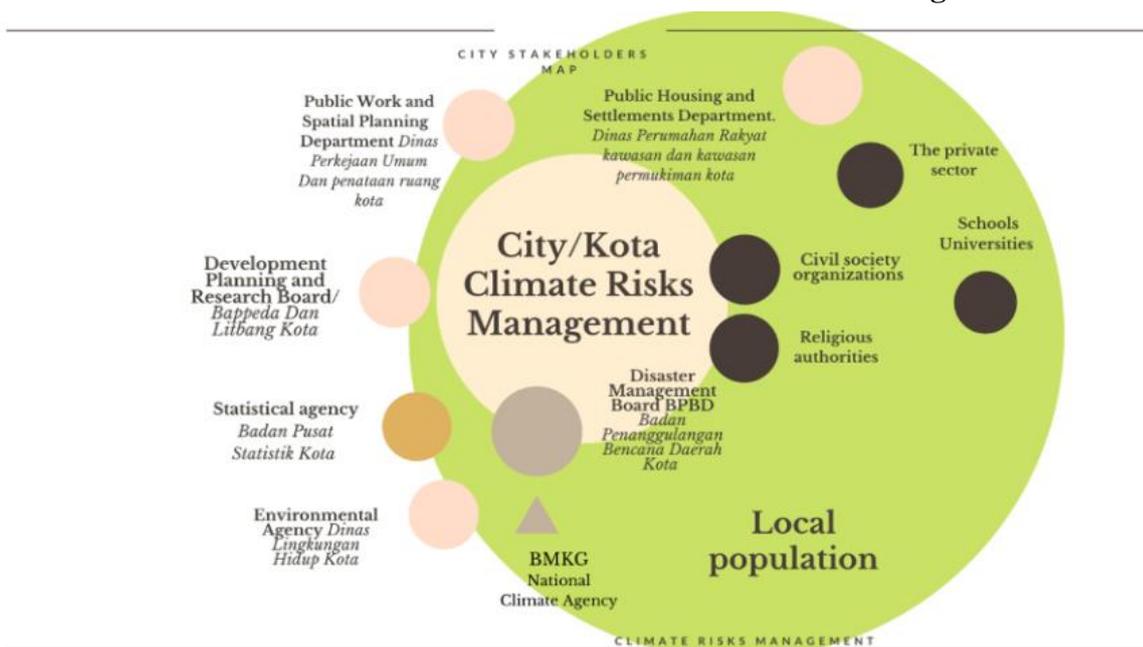
yang mana jenis kota-kota tersebut tidak menjadi prioritas untuk kebijakan nasional dalam hal pendanaan terhadap adaptasi iklim, pembangunan respons dan investasi lokal. Kota-kota yang terseleksi tersebut mendapatkan manfaat kerjasama bantuan pembangunan internasional lebih sedikit dari kota-kota besar (Gaborit, 2022).

### **Peran UCLG ASPAC dalam Ketahanan Iklim melalui CRIC**

UCLG ASPAC merupakan sebuah organisasi internasional yang menghubungkan lebih dari 10.000 pemerintah kota dan daerah di Kawasan Asia Pasifik. Sebagai sebuah TMN yang mendorong adanya aksi kolaborasi seluruh pemerintah kota dalam mencapai agenda-agenda global seperti penanganan perubahan iklim, UCLG ASPAC memprakarsai CRIC yang mana merupakan proyek kerjasama multi-stakeholder dalam aspek pembangunan berkelanjutan, tata kelola pemerintahan yang baik dan adaptasi/mitigasi iklim. Hal ini kemudian ditekankan oleh Sekretaris Jendral UCLG ASPAC, Bernadia Irawati (dalam Priyadi et al., 2020) dalam Laporan Kajian Perkotaan Cirebon yang dirilis pada tahun 2020 bahwa melalui CRIC, UCLG ASPAC berencana untuk menautkan kota-kota di Asia Pasifik dan menempatkannya sebagai aktor penting dalam aksi-aksi penanganan perubahan iklim.

Jika mengacu pada teori Clive Archer mengenai peran organisasi internasional dalam hubungan internasional maka UCLG ASPAC memiliki peran antara lain sebagai instrumen bagi anggotanya, arena dalam perumusan solusi maupun aktor independen. UCLG ASPAC digunakan sebagai instrumen oleh anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk menyelaraskan tindakan berdasarkan tujuan politik luar negerinya. Peran ini dapat terlihat pada implementasi proyek CRIC di Kota Cirebon yang mana mengadopsi agenda pembangunan berkelanjutan 2030 dan 17 SDGs. Dengan demikian, dalam rangka mendukung program kota berketahanan iklim maka UCLG ASPAC berupaya untuk melokalkan SDGs ke level urban khususnya pada SDG 11 mengenai kota tahan iklim.

**Grafik 1** Peta Stakeholder Climate Risk Management



GABORIT P. PILOT4DEV CRIC 2021

**Sumber: Pascaline Gaborit, Climate adaptation to Multi-Hazard climate related in ten Indonesian Cities: Ambitions and Challenges, (Climate Risk Management, 2022)**

Upaya UCLG ASPAC dalam melokalkan SDGs tak lepas dari sistem multi-level governance yang diterapkan oleh organisasi tersebut. SDGs dalam konteks multi-level governance harus mengakui kompleksitas tata kelola global yang mana tidak hanya terdiri oleh sistem negara berdaulat saja, melainkan juga jaringan ilmuwan, perusahaan, organisasi masyarakat sipil (NGO) serta lingkungan yang menjadi dasar bagi tata kelola global (UCLG ASPAC, 2020). Agussalim dkk. (2018) dalam penelitiannya berjudul *Localizing the Sustainable Development Goals: Assessing Indonesia's Compliance towards the Global Goals* menyatakan bahwa berbagai strategi diperlukan dalam melokalkan SDGs di level nasional maupun sub-nasional yang mana salah satunya adalah dengan membangun jaringan kebijakan melalui penggabungan ide-ide dari aktor non-negara.

Upaya melokalkan SDGs di level urban oleh UCLG ASPAC disetujui oleh pemerintah daerah melalui Surat Pernyataan Komitmen Kota Cirebon untuk Implementasi Proyek Kota-Kota Tangguh Iklim dan Inklusif (CRIC). Melalui dokumen tersebut Wali Kota Cirebon menyatakan akan menyelaraskan tujuan CRIC dengan kebijakan dan prioritas pembangunan kota dalam meningkatkan ketahanan iklim. Tujuan-tujuan yang secara khusus akan dikembangkan dan diadopsi oleh Kota

Cirebon adalah antara lain: (1) Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, (2) Penggunaan sumber daya yang berkelanjutan oleh kota, (3) Kohesi sosial dan kota yang inklusif, (4) Ketahanan kota dan aksi bagi lingkungan, dan terakhir (5) Kesejahteraan dan inovasi dalam kota (Pemerintah Daerah Kota Cirebon, 2020).

Selain itu, peran UCLG ASPAC sebagai instrumen juga dapat terlihat pada pernyataan lanjutan dari Wali Kota Cirebon yang hendak menjadikan hasil proyek CRIC sebagai aksi iklim kota dan kontribusi terhadap pencapaian Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia sekaligus Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) (Pemerintah Daerah Kota Cirebon, 2020). Dalam hal NDC sendiri, pemerintah Indonesia memiliki komitmen untuk mengurangi emisi GRK pada 2030 sebesar 29% dengan upaya sendiri dan 41% jika ada dukungan internasional (KLHK, 2017). Dengan demikian, terdapat keselarasan mengenai tujuan implementasi proyek CRIC di Kota Cirebon dengan misi Kota Cirebon sendiri dalam berkontribusi terhadap pencapaian kepentingan nasional.

Adapun peran UCLG ASPAC sebagai arena dalam merumuskan solusi terhadap permasalahan-permasalahan domestik anggotanya. Dalam menjalani perannya tersebut, UCLG ASPAC menghimpun para pemangku kepentingan dalam pembuatan keputusan secara bersama-sama sekaligus menjembatani komunikasi di antara mereka. Hal ini dapat terlihat pada mitra-mitra dalam proyek CRIC yang terdiri dari berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, kementerian, organisasi internasional, universitas, dan masih banyak lagi. Kemudian dalam implementasinya, mitra-mitra tersebut turut memberikan solusi dalam bentuk rekomendasi kebijakan untuk diterapkan kepada pemerintah daerah setempat dalam perumusan Climate Action Plan (CAP) atau rencana aksi iklim. Selain itu, kegiatan pelatihan (workshop) juga diadakan secara rutin oleh UCLG ASPAC dalam rangka meningkatkan kemampuan dan wawasan pemerintah daerah untuk pengembangan rencana aksi iklim. Kegiatan ini telah berlangsung untuk yang ke-3 kalinya di Kota Cirebon yang mana membahas mengenai hasil inventarisasi emisi GRK, serta baseline dan penyusunan rencana aksi dengan pendampingan langsung oleh tim CCROM SEAP sebagai ahli di tingkat nasional (UCLG ASPAC, 2022).

Terakhir, peran UCLG ASPAC dalam ketahanan iklim sebagai aktor independen. Sebagai sebuah asosiasi terbesar yang menghubungkan seluruh pemerintah kota dan daerah di kawasan Asia Pasifik, UCLG ASPAC memiliki hak prerogatif tanpa adanya intervensi dari pihak manapun dalam mencapai tujuannya. Hal ini terlihat pada bagaimana UCLG ASPAC mengimplementasi proyek CRIC dengan Uni Eropa sebagai mitranya. Uni Eropa merupakan salah satu mitra UCLG ASPAC yang menjadi donor utama dalam proyek CRIC. Meskipun begitu hal ini tetap tidak mempengaruhi seluruh proses kebijakan UCLG ASPAC dalam mengatasi perubahan iklim di kawasan Asia Pasifik. Hal tersebut dikarenakan karakteristik dasar pada TMN sendiri yang merupakan jaringan kerjasama horizontal dan bersifat non-hirarkis. Dengan demikian, alih-alih paksaan dari atas ke bawah, sistem tata kelola pemerintahan dalam TMN mengandalkan persuasi dan contoh-contoh yang baik (Wiharani & Holzacker, 2016). Selain itu, penelitian dengan judul *The Role of UCLG ASPAC in Managing Waste in DKI Jakarta Province in 2016-2019: Opportunities & Challenges* yang ditulis oleh Rahmania dkk. (2019) menyatakan bahwa UCLG ASPAC tidak ingin dianggap sebagai organisasi yang membawa tujuan politik tertentu melainkan tujuannya hanyalah untuk membantu, mendorong, memfasilitasi dan mendukung pemerintah daerah agar bertindak secara independen.

### **Tujuan UCLG ASPAC Memilih Kota Cirebon**

Terpilihnya Kota Cirebon sebagai salah satu kota percontohan pada proyek CRIC tidak terlepas dari peran UCLG di kawasan Asia Pasifik. Kawasan Asia Pasifik sendiri merupakan wilayah yang terbentang sepanjang pesisir pantai Asia Timur, Asia Tenggara, Australia hingga Oceania. Sebagai sebuah kawasan yang sebagian besar penduduknya bergantung pada sektor pertanian dan perikanan, kawasan tersebut merupakan kawasan yang paling rentan terdampak perubahan iklim di dunia. Hal ini dikarenakan kondisi geografis di kawasan tersebut yang merupakan wilayah dataran rendah dengan garis pantai yang luas ditambah dengan keberadaan pulau-pulau kecil, menjadikan kawasan ini sangat rentan terhadap kenaikan permukaan air laut dan cuaca ekstrem seperti kekeringan, banjir dan angin topan (UNDP, 2021). Selain disebabkan oleh faktor geografis, perubahan iklim di Kawasan Asia Pasifik juga didorong oleh lemahnya infrastruktur dan masyarakat yang cenderung miskin (Anbumozhi et al., 2012).

Terpilihnya Kota Cirebon sebagai salah satu dari sepuluh kota percontohan proyek CRIC menjadi hal yang sangat penting bagi UCLG ASPAC dalam mencapai tujuan organisasi tersebut khususnya dalam pengembangan dan implementasi aksi iklim di kawasan. Selain didorong oleh kerentanan kota tersebut terhadap perubahan iklim, terpilihnya Kota Cirebon dalam CRIC disebabkan oleh posisinya yang strategis yakni di antara kota/daerah seperti Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Laporan Kajian Perkotaan yang ditulis oleh Priyadi dkk. (2020) menyebutkan bahwa letak strategis Kota Cirebon ditambah dengan kelengkapan infrastruktur yang dimilikinya mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai kegiatan pembangunan kota. Selain itu, Priyadi dkk. juga menambahkan bahwa kota tersebut bergerak cepat dalam proses adaptasi, salah satunya melalui penyusunan dokumen perencanaan pembangunan bernama Smart City Master Plan of Cirebon.

Keunggulan dan keunikan yang dimiliki oleh Kota Cirebon menjadi daya tarik tersendiri bagi UCLG ASPAC untuk mengimplementasi proyek percontohnya di kota tersebut. Jika mengacu pada teori peran organisasi internasional maka tujuan UCLG ASPAC adalah agar Kota Cirebon bertindak sesuai dengan tujuan organisasi tersebut khususnya dalam upaya menangani perubahan iklim. Hal ini sebagaimana peran organisasi internasional sebagai aktor independen yang mana berarti organisasi internasional memiliki kemampuan untuk bergerak menjadi perintis bagi pembuat kebijakan agar kebijakan tersebut diterapkan pada suatu negara (Archer, 1983).

Adapun nature dari praktik proyek kota percontohan sendiri yang mana menghasilkan output berupa pembelajaran dan perubahan suatu kebijakan. Proyek kota percontohan bertujuan untuk menguji dan menerapkan inovasi teknologi dalam konteks tertentu juga untuk memitigasi isu yang ada. Pengetahuan yang dikembangkan dalam proyek kota percontohan juga harus mengalir kembali ke dalam proses pemecahan masalah dan pengambilan keputusan (Vreugdenhil et al., 2010). Selain itu, S. Hughes dkk. (2020) dalam penelitiannya berjudul *The Role of Pilot Projects in Urban Climate Change Policy* menyebutkan bahwa proyek kota percontohan menjadi salah satu cara di mana kota bereksperimen dengan cara-cara baru untuk mengatur dan membiayai aksi mitigasi perubahan iklim.

Dengan demikian, Proyek CRIC pada beberapa kota di Indonesia seperti Kota Cirebon dapat menjadi pembelajaran khususnya inovasi kebijakan bagi kota-kota lainnya yang tergabung dalam keanggotaan UCLG ASPAC. Jika mengacu pada pemahaman mengenai proyek kota percontohan sendiri maka pengetahuan yang didapat melalui proyek CRIC di Kota Cirebon dapat menjadi sumber daya bagi UCLG ASPAC untuk mengembangkan kebijakan baru dalam menangani perubahan iklim terhadap anggota-anggotanya.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Ancaman perubahan iklim yang terjadi di Kota Cirebon mendorong terpilihnya kota tersebut sebagai salah satu kota dalam implementasi proyek kota-kota berketahanan iklim dan inklusif (CRIC). Hal ini dikarenakan UCLG ASPAC yang memprioritaskan proyeknya pada kota yang paling rentan sekaligus kota-kota pesisir berukuran kecil dan menengah. Kota Cirebon sendiri berpotensi tinggi terhadap dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim seperti kenaikan permukaan air laut, gelombang pasang ekstrim, banjir/rob, dan kekeringan. Jika dilihat pada sektor pengelolaan sampah, emisi GRK yang dikeluarkan oleh volume sampah di Kota Cirebon mempercepat laju perubahan iklim dan menghambat tercapainya NDC Indonesia.

Terpilihnya Kota Cirebon sebagai salah satu kota percontohan dalam proyek CRIC merupakan upaya UCLG ASPAC dalam melokalkan SDGs ke level urban. Proyek yang disetujui oleh adanya Surat Pernyataan Komitmen Kota Cirebon untuk Implementasi Proyek Kota-Kota Tangguh Iklim dan nantinya akan diakui sebagai aksi iklim kota dan kontribusi terhadap pencapaian NDC dan SDGs Indonesia menjadi bukti peran UCLG ASPAC dalam ketahanan iklim sebagai instrumen bagi anggotanya dalam mencapai tujuan tertentu. CRIC sebagai sebuah proyek multi-stakeholder yang mana berisi berbagai pemangku kepentingan meliputi pemerintah daerah, kementerian, organisasi internasional, universitas, dan lainnya dalam implementasinya terdapat pelaksanaan kegiatan pelatihan secara rutin oleh UCLG ASPAC menunjukkan peran kedua UCLG ASPAC, yakni sebagai arena dalam merumuskan solusi terhadap permasalahan-permasalahan domestik anggotanya. UCLG ASPAC memiliki hak prerogatif dalam mencapai tujuannya tanpa adanya intervensi dari pihak manapun, tak terkecuali Uni Eropa sebagai donor utama proyek CRIC. Sebagai sebuah TMN yang

mana memiliki karakteristik kerjasama horizontal dan non-hirarkis, UCLG ASPAC tidak menganggap dirinya sebagai organisasi yang membawa tujuan politik tertentu. Hal ini menggambarkan peran terakhir UCLG ASPAC dalam ketahanan iklim yakni sebagai aktor independen.

Sebagai aktor independen, UCLG ASPAC juga memiliki tujuan dalam memilih kota Cirebon sebagai salah satu kota percontohan dalam implementasi proyek CRIC yang mana organisasi tersebut menginginkan agar Kota Cirebon bertindak sesuai dengan tujuan UCLG ASPAC khususnya dalam upaya menangani perubahan iklim di Kawasan Asia Pasifik. Sebagai sebuah kota yang memiliki keunikan dan keunggulannya tersendiri, implementasi proyek kota percontohan CRIC di Kota Cirebon menjadi pembelajaran bagi kota-kota lainnya yang merupakan anggota UCLG ASPAC untuk mengumpulkan sumber daya yang nantinya akan berguna di dalam proses pemecahan masalah dan pengambilan keputusan terkait penanganan perubahan iklim.

### **Saran**

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan referensi dan sebagai bahan pertimbangan untuk lebih memperdalam penelitian selanjutnya mengenai tujuan jaringan kota transnasional dengan menggunakan metode pengumpulan data yang berbeda seperti metode observasi partisipatif sehingga bisa memperoleh data lebih banyak lagi mengenai objek yang diteliti. Selain itu, untuk memperdalam penelitian selanjutnya mengenai jaringan kota transnasional kota, peneliti selanjutnya juga bisa mengganti objek penelitian yang berupa kerjasama internasional baik pada proyek kota percontohan ataupun proyek sister-city.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Agussalim, D., Umar M., A. R., Larasati, K., & Tobing, D. H. (2018). Localizing the Sustainable Development Goals: Assessing Indonesia's Compliance towards the Global Goals. In Sustainable Development Goals in Southeast Asia and ASEAN (Issue June, pp. 39–62). BRILL. [https://doi.org/10.1163/9789004391949\\_003](https://doi.org/10.1163/9789004391949_003)

Alliance, C. (n.d.). UCLG. Cities Alliance. Retrieved July 5, 2022, from <https://www.citiesalliance.org/uclg>

Anbumozhi, V., Breiling, M., Pathmarajah, S., & Reddy, V. R. (2012). Climate Change in Asia and the Pacific: How Can Countries Adapt? In Asia Development Bank Institute. [www.sagepub.in](http://www.sagepub.in)

Archer, C. (1983). *International Organizations* (4th ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315751511>

Bakry, U. S. (2017). *Metode Penelitian Hubungan Internasional* (2nd ed.). Pustaka Pelajar.

Betsill, M. M., & Bulkeley, H. (2004). Transnational Networks and Global Environmental Governance: The Cities for Climate Protection Program. *International Studies Quarterly*, 48(2), 471–493. <https://doi.org/10.1111/j.0020-8833.2004.00310.x>

Fikri, A. A. (2021). Tanpa Pengelolaan Sampah, Usia TPA Kota Cirebon Tersisa Tiga Tahun. *Kompas*. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/06/07/tanpa-pengelolaan-sampah-usia-tpa-kota-cirebon-tersisa-tiga-tahun>

Gaborit, P. (2022). Climate adaptation to Multi-Hazard climate related risks in ten Indonesian Cities: Ambitions and challenges. *Climate Risk Management*, 37(August), 100453. <https://doi.org/10.1016/j.crm.2022.100453>

Gaborit, P., Aleksic, D., Marengo, P., Silva, S., & Pathak, K. K. (2020). *Climate Resilient and Inclusive Cities Project - Policy Brief* (Vol. 58, Issue 2019). <https://www.resilient-cities.com/en/knowledge/175-policy-briefs-for-pilot-cities-2>

Handayani, L. S., & Puspita, R. (2021). Kota Cirebon Hasilkan 350 Ton Sampah per Hari. *Republika*. <https://www.republika.co.id/berita/qp18rq428/kota-cirebon-hasilkan-350-ton-sampah-per-hari>

Hughes, S., Yordi, S., & Besco, L. (2020). The Role of Pilot Projects in Urban Climate Change Policy Innovation. *Policy Studies Journal*, 48(2), 271–297. <https://doi.org/10.1111/psj.12288>

KLHK. (2017). *Strategi Implementasi NDC*. In Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. [http://ditjenppi.menlhk.go.id/reddplus/images/adminppi/dokumen/strategi\\_implementasi\\_ndc.pdf](http://ditjenppi.menlhk.go.id/reddplus/images/adminppi/dokumen/strategi_implementasi_ndc.pdf)

Laksono, M. Y. (2021, September 17). Mengkhawatirkan, Muka Tanah Cirebon, Pekalongan, Semarang, dan Surabaya Turun Paling Ekstrem. *Kompas*. <https://www.kompas.com/properti/read/2021/09/17/060000121/mengkhawatirkan-muka-tanah-cirebon-pekalongan-semarang-dan-surabaya?page=all>

Lindsey, R. (2021, October). *Climate Change: Global Sea Level*. NOAA Climate. <https://www.climate.gov/news-features/understanding-climate/climate-change-global-sea-level>

Pemerintah Daerah Kota Cirebon. (2020). *Surat Pernyataan Komitmen Kota Cirebon untuk Implementasi Proyek Kota-Kota Tangguh Iklim dan Inklusif (CRIC)*.

Pemerintah Daerah Kota Cirebon. (2021). *Program Penanggulangan Dampak Perubahan Iklim Telah Dilakukan di Kota Cirebon - Pemerintah Daerah Kota Cirebon*. <https://www.cirebonkota.go.id/2021/program-penanggulangan-dampak-perubahan->

iklim-telah-dilakukan-di-kota-cirebon/

Priyadi, H., Marlinang, N., Kristanti, A., & Aldian, D. (2020). Urban Analysis Findings Cirebon City. <https://www.resilient-cities.com/files/40/Presentation/16>

Radar Cirebon. (2021). Pemkot Cirebon KLHS Terbaik Tingkat Provinsi. Radar Cirebon. <https://www.radarcirebon.com/2021/11/24/pemkot-cirebon-klhs-terbaik-tingkat-provinsi/>

Rahmania, S. A., Heryadi, R. D., & Fathun, L. M. (2019). The Role Of Uclg Aspac In Managing Waste In DKI Jakarta Province In 2016-2019: Opportunities & Challenges. *Tanjungpura International Journal on Dynamics Economics, Social Sciences and Agribusiness (TIJDESSA)*, 1(1), 81–101.

Riawan, B. (2022, July 17). APEKSI, Pemkot Se Indonesia Seriusi Tangani Perubahan Iklim Dan Bencana Alam - Sosial . RRI Gorontalo. [https://rri.co.id/gorontalo/sosial/1540357/apeksi-pemkot-se-indonesia-seriusi-tangani-perubahan-iklim-dan-bencana-alam?utm\\_source=news\\_main&utm\\_medium=internal\\_link&utm\\_campaign=General%20Campaign](https://rri.co.id/gorontalo/sosial/1540357/apeksi-pemkot-se-indonesia-seriusi-tangani-perubahan-iklim-dan-bencana-alam?utm_source=news_main&utm_medium=internal_link&utm_campaign=General%20Campaign)

S, K.-K., & Pease. (2008). *International Organization: Perspectives on Governance in The Twenty-First Century*. Prentice Hall.

Sending, O. J., Øverland, I., & Hornburg, T. B. (2020). Climate Change and International Relations. Source: *Journal of International Affairs*, 73(1), 183–194. <https://doi.org/10.2307/26872788>

Sørensen, G., & Jackson, R. H. (2013). *Introduction to International Relations: Theories and Approaches* (5th ed.). Oxford University Press.

UCLG. (n.d.). What is UCLG. Retrieved November 25, 2021, from <https://www.uclg.org/en/organisation/about>

UCLG ASPAC. (2020). *Local Governments Newsletter*. 32(November 2019-April 2020), 1–404.

UCLG ASPAC. (2021, April). *Enabling Environment on Climate Resilient and Inclusive Cities: Cities' Engagement and Commitment in Climate Action Plan*. <https://uclg-aspac.org/en/enabling-environment-on-climate-resilient-and-inclusive-cities-cities-engagement-and-commitment-in-climate-action-plan/>

UCLG ASPAC. (2022, May 31). *CRIC Programme: Lively Discussions through the Presence of Multi-Stakeholders*. UCLG ASPAC. <https://uclg-aspac.org/cric-programme-lively-discussions-through-the-presence-of-multi-stakeholders/>

UN Habitat. (n.d.). *Climate change, circular economy, waste management* . UN Habitat. Retrieved July 24, 2022, from <https://unhabitat.org/climate-change-circular-economy-waste-management>

UNDP. (2021). UNDP's Climate Promise in Action in Asia and the Pacific. United Nations Development Programme. <https://www.undp.org/asia-pacific/news/undps-climate-promise-action-asia-and-pacific>

UNEP. (n.d.). Climate change and security risks. UN Environment Programme. Retrieved July 23, 2022, from <https://www.unep.org/explore-topics/disasters-conflicts/what-we-do/disaster-risk-reduction/climate-change-and-security>

UNFCCC. (2021, October 31). State of Climate in 2021: Extreme Events and Major Impacts . United Nations Climate Change. <https://unfccc.int/news/state-of-climate-in-2021-extreme-events-and-major-impacts>

Vreugdenhil, H., Slinger, J., Thissen, W., & Rault, P. K. (2010). Pilot projects in water management. *Ecology and Society*, 15(3). <https://doi.org/10.5751/ES-03357-150313>

Wiharani, A. P., & Holzacker, R. (2016). Environmental Governance by Transnational Municipal Networks: The Case of Indonesian Cities. In *Decentralization and Governance in Indonesia* (Vol. 2, pp. 221–229). Springer International Publishing. [https://doi.org/10.1007/978-3-319-22434-3\\_8](https://doi.org/10.1007/978-3-319-22434-3_8)

Wu, D. (2020). City Diplomacy, Multilateral Networks and the Role of Southeast Asia. *Jurnal Global & Strategis*, 14(1), 17. <https://doi.org/10.20473/jgs.14.1.2020.17-30>

Wu, P.-C., Wei, M., & D'Hondt, S. (2022). Subsidence in Coastal Cities Throughout the World Observed by InSAR. *Geophysical Research Letter*, 49(7). <https://doi.org/10.1029/2022GL098477>